

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA PNPM DI DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH
FINKO DJAFAR
E11.16.126

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 15 Mei 2020**

Menyetujui,

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramli, SE., M.Ak
NIDN 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGELOLAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA PNPM DI DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH
FINKO DJAFAR
E11.16.131

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020

Komisi Penguji :

1. Reyther Biki, SE., M.Si
2. Afriana Lomagio, SE., M.Ak
3. Fitrianti, SE., M.Ak
4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
5. Rizka Yunika Ramli, SE, M.Ak

:
:
:
:
:

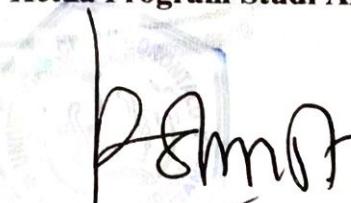
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagsan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 15 April 2020

Yang membuat pernyataan



(Finko Djafar)
NIM. E11.16.131

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil Penelitian ini bahwa dilihat Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh simpan pinjam kelompok perempuan khususnya di Kecamatan Tomilito ini melalui proses yang dinamakan proses verifikasi. Salah satu prosesnya yakni wawancara, yang dilakukan kepada mereka kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan dana pinjaman, Pelaksanaan penyaluran dana di SPKP Kecamatan Tomilito perlu adanya beberapa tahapan untuk bisa diketahui apakah pinjaman ini disetujui atau tidak. Tahapan ini berguna untuk mengetahui data kelompok peminjam nanti, Pengawasan program SPKP ini masih bekerja sama dengan BKAD dalam hal memantau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mereka jalankan. Ini juga tidak terlepas dari adanya rapat koordinasi yang mereka laksanakan setiap selesai program kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan perkembangan kegiatan program SPKP, Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak SPKP yakni laporan pada saat adanya evaluasi ataupun pemeriksaan. Laporan ini berbentuk dua laporan, berupa laporan kegiatan dan laporan laba rugi atau laporan pembukuan yang berhubungan dengan dana yang sudah disalurkan kepada pihak kelompok peminjam.

Kata Kunci : Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi sumber daya alam terbesar didunia. Potensi ini sampai sekarang lebih banyak oleh masyarakat pedesaan. Pada masa orde baru, pedesaan menjadi basis utama pertumbuhan ekonomi Negara. Meskipun sampai saat ini masyarakat pedesaan masih berada pada tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan pergantian secara langsung dari pemerintah, sehingga langkah-langkah pemerintah Era reformasi ditindak lanjuti melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pedesaan. Program ini berangkat dari sebuah kerangka pemahaman bahwa melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek upaya penanggulangan kemiskinan (TP PNPM Mandiri, 2009).

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara. Berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seirang atau kelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Setiap Negara mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya dengan adanya Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berdasarkan atas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang terlibat secara langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Salah satu kegiatan yang di danai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan adalah kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

Masyarakat pedesaan secara mandiri mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada diwilayahnya, dengan memanfaatkan dana bantuan PNPM pedesaan. Salah satu bagian dari program yang dikembangkan ialah adanya simpan pinjam kelompok perempuan atau SPKP. Sasaran utama dari program SPKP adalah pemberdayaan perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga pedesaan yang umumnya lebih banyak mengelola urusan rumah tangga dibandingkan membantu peningkatan ekonomi keluarga.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) ini merupakan kegiatan pemberian dana pinjaman untuk kelompok perempuan yang memiliki usaha mikro atau simpan pinjam. Dengan tujuan untuk meningkatkan serta menberdayakan kaum perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan usaha yang dimiliki agar mampu membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sebenarnya banyak fakta menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan seringkali menjadi pihak tertinggal, padahal terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan. Pertama akses dan kontrol akan pembangunan biasa dilakukan atau didapatkan perempuan dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, baik diarea publik atau domestic.

Keberdayaan perempuan dibidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik mempunyai hak-hak kepemilikan dan bebas untuk bekerja diluar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat. Lenih dari seabad lalu dikemukakan Kartini, bahwa tiap perempuan meski memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestic, keluarga, dan lingkungan sosial.

Didesa Bubode Kecamatan Tomilito telah dibentuk suatu kegiatan yang bernama Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai bahan tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan. Kegiatan SPP ini dibentuk seiring hadirnya PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan adanya kegiatan SPP akan sangat medukung dalam meningkatkan keberdayaan para perempuan agar mampu mandiri dan tidak hanya bergantung pada suami mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Namun pada pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Bubode tidak berjalan dengan baik yakni adanya kendala pada rendahya partisipasi dari masyarakat yang

terlibat didalamnya, kemudian hasil kegiatan tidak terpelihara/hasil kegiatan atau dana yang dipinjam tidak dapat dimanfaatkan pada tempatnya.

Dari sekian banyak problematika dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini terdapat di Desa bubode. Dari uraian di atas mak peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul "**Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Makdsud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan bagaimana pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaaat Penelitian

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan banyak manfaat kepada semua baik mafaat teoritis, manfaat praktis, maupun manfaat bagi peneliti.

1. Mafaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini kiranya dapat di jadikan sebagai bahan informasi pada ruang lingkup publik dalam pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di desa Bubode Kecamatan Tomilito.

2. Manfaat praktis

Memberikan rangsangan kepada pengelola SPKP untuk lebih memperhatikan maksimalisasi pengelolaan SPKP sehingga dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan.

3. Bagi Masyarakat

Menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) mampu memberikan bantuan modal dalam usaha peningkatan usaha ekonomi pedesaan utamanya kaum perempuan.BAB II

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola/proses/melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Suharsimi Arikunta, (2013) “pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya”.

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pencapaian tujuan. Pengelolaan juga diartikan sebagai proses untuk melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain. (Aditya Pratama,2012).

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011), istilah pengelolahan yang sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan

mengarahkan usaha manusia untuk menfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita, (2011) “mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”. “Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa , pengelolahan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yakni:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja.

Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). (Adisasmita, 2011)

1. Perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarenakan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.
2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengarahan. Pengarahan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.
4. Pengawasan. Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

2.1.3 Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Program SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007).

SPP dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Tujuan dari PNPM mandiri perdesaan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok perempuan dan disamping juga mampu meningkatkan kesempatan kerja yaitu

suatu keadaaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para penawar kerja (pencari kerja).

Menurut Subagyo (2011), program SPP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, agar program tersebut berjalan efektif. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah kegiatan yang di lakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana pinjaman.

2.1.4 Tujuan Dan Ketentuan

- a. Tujuan Umum.** Kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
- b. Tujuan Khusus.** Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
 - a. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui
 - b. Mendorong pengiatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.
- c. Ketentuan Dasar.** Ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) adalah sebagai berikut: Kemudahan adalah masyarakat

miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

- a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPKP di salurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan penelolaan pinjaman.
- b. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan di dasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum peempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- c. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan penumbuhan efektifitas ekonomi perdesaan.
- d. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1. Ketentuan pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

- a. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan SPKP.

1. Sasaran program

Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan (SPKP) yang sudah ada di masyarakat.

2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dan simpanan dan pengelolaan dan pinjaman.

b. Ketentuan kelompok simpan pinjam perempuan (SPKP)

1. Kelompok yang di kelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan penemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-krangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan simpanan dan pinjaman yang telah di sep akati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang di berikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berjalan dengan baik.
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

2.1.5 Mekanisme pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program PNPM Mandiri perdesaan akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dan tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah Antar Desa (MAD)

Dalam Musyawarah Antar Desa di lakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPKP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPKP dan dapat memanfatkannya.

2. Musdes sosialisasi

Dalam musdes sosialisasi di lakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPKP di tingkat desa memahami adanya kegiatan SPKP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3. Musyawarah dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut:

a). Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan perkembangan kelompok SPKP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari : kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap.

Proses kategorisasi mengacu pada ketentuan kategorisasi perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin (RTM) yang akan menjadi pemanfaat.

b). Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar di lakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.

c). Hasil musyawarah dusun di tuangkan dalam berita acara dilampiri dengan:

1. daftar kelompok yang diidentifikasi
 2. Kelompok SPKP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan
 3. Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
 4. Rekap kebutuhan pemanfaat
 5. Musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan
4. Musyawarah Desa

Musyawarah ini merupakan tahap seleksi di tingkat desa adalah:

1. Penetuan usulan desa untuk kegiatan SPKP melalui keputusan musyawarah khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan MKP merupakan usulan desa untuk SPKP.
2. Hasil keputusan di ajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam usaha paket desa.
3. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan di kompetisikan di tingkat kecamatan.
4. Penulisan usulan SPKP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut:
 - a. Sekilas kondisi SPKP
 - b. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana

usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.

- c. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang di usulkan di lengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

5. Verifikasi

Hal-hal yang harus di lakukan dalam proses verifikasi kegiatan SPKP adalah:

- a. Penetapan formulir verifikasi penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia proses pelaksanaan verifikasi.
- b. Verifikasi kegiatan kelompok SPKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 1. Pengalaman kegiatan simpan pinjam
 2. Persyaratan kelompok
 3. Kondisi simpan pinjam dengan penilaian:
 - a. Permodalan
 - b. Kualitas pinjaman
 - c. Administrasi dan pengelolaan
 - d. Pendapatan
 - e. Likuiditas (pandangan jangka pendek)
 4. Penilaian khusus rencana kegiatan

5. Jumlah rumah tangga miskin sebagai contoh pemanfaat di perikusi dengan daftar rumah tangga miskin
6. Penilaian kategorisasi kelompok
7. Pembuatan Berita Acara (BA) hasil perikusi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan di kategorisasi perkembangan kelompok.

6. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian dikenakan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergantung dalam paket usulan desa.

Penilaian dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Kegiatan dilakukan pada seluruh kelompok simpan pinjam SPKP tanpa memperhatikan alat desanya, sehingga rangking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa. Hasil pemeringkatan kelompok SPKP sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok

layak akan di danai dari BLM. Tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan perjanjian pinjaman. prioritas kebutuhan kelompok simpan pinjam perempuan (SPKP) agar mempertimbangkan:

- a). Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota pemanfaat.
- b). Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok.
- c). Hasil penilaian kelompok penyusun yang di tuangkan dalam berita acara TIM Verifikasi. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.
- d). Pertimbangan lain yang mendukung pengangguran jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

7. Musyawarah Antar Desa penetapan usulan

Pada tahap ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat di danai dengan dana BLM. Dalam Musyawarah Antar Desa penetapan usulan ini, di mungkinkan adanya kelompok yang di dana sesuai dengan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima.

8. Penetapan persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal:

- a. Penetuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan dan pada wilayah masing-masing sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
- b. Jangka waktu pinjaman Sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
- c. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak di angsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.
- d. Angsuran langsung kelompok ke unit pelaksanaan UPK

9. Pencarian Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program
- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
- c. Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional UPK 3% dengan bukti kuitansi yang ditanda tangani oleh ketua UPK sebagai pengelolah kegiatan.

d. kelompok perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi permintaan dana.

e. kelompok menyerahkan kuintansi atau tanda terima uang pemmanfaat kepada UPK.

10. pengelolah dukumen dan adminitrasi di UPK pengelolaan kegiataan di tingkat UPK yaitu :

a. pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai : pengelolaan data kelompok dan peminjam atau pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.

b. pengelolaan administrasi meliputi rekening pengembalian SPKP, buku bantuan SPKP buku kas harian SPKP dan kartu pinjaman

c. pengelolaan pelaporan realisasi penyaluran, pinjaman, SPKP, dan laporan operasional.

d. Pengelolaan administrasi meliputi rekening SPKP, buku bantuan bank SPKP, buku kas harian SPKP, dan kartu pinjaman.

e. Pengelolaan pelaporan realisasi penyaluran, pinjaman SPKP, dan laporan operasional

11. Pengelolaan dokumen dan administrasi di kelompok

Hal-hal yang di kelola di tingkat kelompok meliputi data-data peminjam, dokumen pendanaan atau kuitansi di kelompok atau pemanfaat administrasi

realisasi pengambilan pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengambilan atau pinjaman dan administrasi pinjaman pemanfaat.

1. Penetapan daftar tunggu.

Usulan kegiatan kelompok SPKP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah di anggap layak dapat dana dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat di tetapkan sebagai kelompok tunggu yang di laporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini di tetapkan dengan berita acara.

12. Pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Pelestarian SPKP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah di sepakati oleh MAD:

1. Pelestarian kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan:

- a. Adanya dana kegiatan SPKP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
- b. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.

- c. penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan atau kelembagaan kelompok.
 - d. Pengembangan pelayan kepada masyarakat.
 - e. Pengembangan kelompok
2. Pengembangan kelompok SPKP di arahkan sebagai lembaga pengelolaan simpanan dan pinjaman yang propesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyulur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPKP, secara badan hukum dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Pasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok mapun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Yolanda Hangkiho (2014)	Pengelolaan kegiatan simpan pinjam perempuan di desa bendungan kabupaten bonebolango.	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Bendungan Kabupaten Bone Bolango telah mencapai hasil yang maksimal. Pada awal berdirinya dana yang di gulirkan baru mencapai 20 juta perkelompok dan kemudian mencapai 50 juta sampai 100 juta perkelompok. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di simpulkan bahwa Pengelolaan Simpan Pinjam Kelomok Perempuan (SPKP) DI Desa Bendungan Kabupaten Bone Bolango menjadi baik dan usaha sanagat meembantu masyarakat dalam memperbaiki ekonomi serta kesejahteraan hidup masyarakat. Melalui kegiatan SPKP kesejahteraan penduduk di desa Bendungan kabupaten Bone Bolango menjadi

			baik dan usaha menjadi lancar dan kemiskinan serta pengaguran dapat tertanggulangi.
2.	Marlina Sinaga (2018)	Peranan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Hasil penelitiannya yaitu peranan UPK PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kantor UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dikatakan baik. Dapat dilihat dengan peran UPK PNPM Mandiri yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan standar alur prosedur.
3.	Isnaeni (2018)	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) ada suatu pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan di Kecamatan Purwojati, Banyumas. Perubahan yang dapat dirasakan oleh pemanfaat kegiatan SPP yakni kaum perempuan yang

			sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan dan mayoritas membuka usaha dagang dari hasil pinjaman dana dari SPP, dan kini mereka mampu lebih produktif serta dapat membantu perekonomian keluarga.
--	--	--	--

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang

Tabel 2.2 Sekarang

NO.	Nama	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Finko Djafar (2019)	Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.	Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh simpan pinjam kelompok perempuan khususnya di Kecamatan Tomilito ini melalui proses yang dinamakan proses verifikasi. Salah satu prosesnya yakni wawancara, yang dilakukan kepada mereka kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan dana pinjaman, Pelaksanaan penyaluran dana di SPKP Kecamatan Tomilito perlu adanya beberapa tahapan untuk bisa diketahui apakah pinjaman ini disetujui atau tidak. Tahapan ini berguna untuk mengetahui data kelompok peminjam nanti, Pengawasan

				program SPKP ini masih bekerja sama dengan BKAD dalam hal memantau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mereka jalankan
--	--	--	--	--

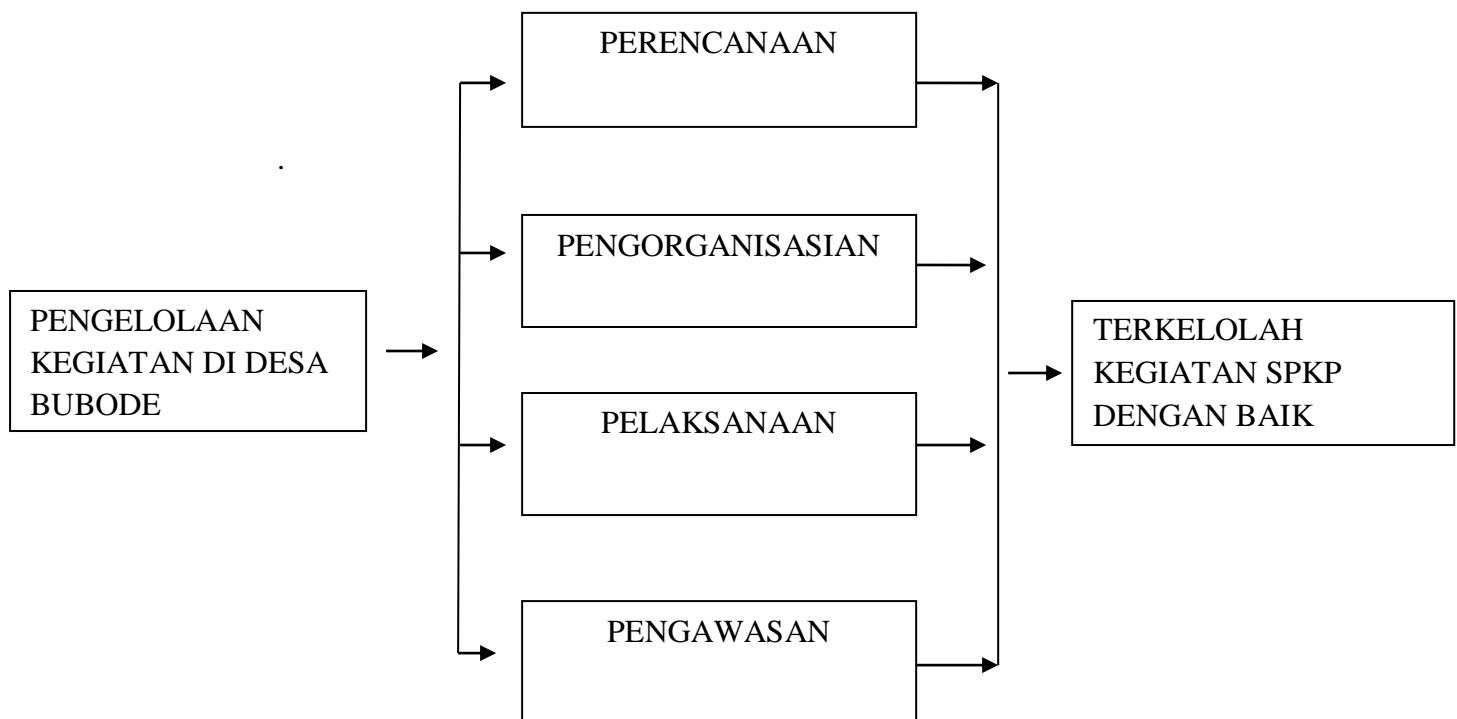
2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) yang merupakan penjabaran dari PPK (Program Pengembangan Kecamatan) adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek penelitian adalah Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Bubode Kecamatan Tomilito

3.2 Metode penelitian

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada cirri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat pengambilan data pokok.

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai yang terjadi di lapangan, dimana data yang di hasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Menurut Anggoro (2013) kegunaan desain penelitian “adalah bahwa DP dirancang untuk menjawab pertanyaan dan atau mengetes hipotesis penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian Studi kasus tunggal.

Menurut Sukmadinata (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini meng-gunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

3.2.2 Operasional variabel penelitian

a. perencanaan (planning)

batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan pengelompokkan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

c. Pengarahan

pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adal agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

d. Pengawasan

Menurut Sujanto (dalam adisasmita, 2011) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dan semestinya.

Table 3.1
Operasional variabel penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan pada Desa Bubode Kecamatan Tomilito	Perencanaan	Perhitungan, penentuan, pelaksanaan, pencapaian.
	Pengorganisasian	Pengelompokkan, penyediaan, wewenang, pelaksanaan.
	Pengarahan	Keinginan, kekuatan, kekuasaan, kepentingan.
	Pengawasan	Penilaian dan pengawasan.

3.2.3 Jenis Data

a. data primer data

adalah data yang di peroleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari responden melalui wawancara dengan ketua unit pelaksanaan kegiatan (UPK) dan ketua kelompok.

b. data sekunder

data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan oleh pihak-pihak lain data sekunder di peroleh dari studi berbagai litilatur dan dokumen terkait seperti data BPS, dan data yang berkaitan dengan program PNPM Kecamatan tomilito, Desa bubode

3.2.4 Informan penelitian

Informan di kemukakan oleh moeleng adalah oeang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 2.3 Informan

No	Informan	Jabatan
1.	Sofyan Yusuf, S.pdi	Ketua UPK Kecamatan Tomilito
2.	Endang Santa	Sekretaris UPK
3.	Aswan Karim	Bendahara UPK

3.2.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang di perlukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data responden teknik

wawancara penilitian ini menggunakan serangkain pertanyaan kepada sejumlah responden yang mampu memberikan keterangan yang di perlukan oleh penulisan yaitu penerapan yang dilakukan PNPM MP dalam pengelolah dan menjalankan kegiatan simpan di desa Bubode.

2. Observasi

Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan dengan mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut. Adapun yang diamati dalam penilitian ini adalah bagaimana penerapan program simpan pinjam kelompok perempuan di desa Budode.

3. Dokumen

Dokumen adalah di tunjukan untuk memperoleh dataa langsung dari tempat penilitian, meliputi buku-buku relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan foto-foto, film documenter, dan data-data relevan. Menurut sugiono, studi dokumen merupakan melengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penilitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penilitian kualitatif ini semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penilitian kualitatif.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah kualitatif, maka data dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpulkan, maka selanjutnya penulis, melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Untuk proses menganalisaan data,

maka menganalisaan dilakukan dengan analisa domain maksudnya adalah peniliti hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsure-unsur yang ada dalam keutuhan objek yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang di kutip oleh Ulber kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu produksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diberikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, pada penyederhanaan, pangabstraksian, data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. penyajian data yaitu sebagai kesimpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. menarik kesimpulan atau verifikasi.

Tahapan terakhir dimana peneliti telah sampai pada suatu kesimpulan mengenai data yang diperoleh.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam PNPM_MP

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah jalan. Program yang sudah jalan tersebut adalah P2KP dan PPK kedua program tersebut telah berjalan sebelum PNPM Mandiri terbentuk. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah

penduduk. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia ada 3 jenis antara lain yaitu:

1. PNPM Mandiri Perdesaan
2. PNPM Mandiri Perkotaan
3. PNPM mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal

Visi dan Misi Instansi

A. Visi Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

- B. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya:
- a) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal,
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat,
 - c) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan Instansi

- A. Tujuan Umum: Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

B. Tujuan Khusus:

- a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perencanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPKP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007). Sebagaimana wawancara dengan informan bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan program simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Tomilito. Beliau menuturkan:

“proses rencana kegiatan program simpan pinjam kelompok perempuan yaitu ada 2 ada tahunan dan ada bulanan upk itu mengidentifikasi kelompok dan anggota yang lancar pengembaliannya itu rencananya akan diberi pinjaman lagi”.

Selanjutnya beliau menuturkan:

“Tapi ada ketentuannya sekalipun dikasih di pinjam kembali tidak akan sama dengan pinjaman awal kalau misalnya ada tunggakan selama 1 sampe 3 bulan dia akan dikurangi 25% dari pinjaman sebelumnya misalnya dia pinjamnya 10 juta jadi tinggal 7.5 juta, kalau tunggakannya sampe 6 bulan akan dikurangi 50% dari pinjaman yang layak untuk nasabah itu, rencana kegiatan berbulan. Setiap bulan upk ada evaluasi setiap kelompok lebih banyak didominasi , untuk pembinaan kelompok, pembinaan kelompok itu dia lebih banyak memberi muatan kepada kelompok semacam kasih semangat buat kelompok itu dalam rangka pengembalian pinjaman, kemudian itu masing-masing lembaga itu, kan di

upk itu ada badan pengawas, ada tim veritivikasi, ada pendanaan, dan masing-masing lembaga itu punya tanggung jawab sendiri”.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan mengenai proses perencanaan kegiatan di SPKP, dapat diketahui bahwa proses kegiatan program simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Tomilito ada dua yakni tahunan dan bulanan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan bapak Sofyan bahwa proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh SPKP itu ada dua tahap, yakni tahapan tahunan dan bulanan. Dari kedua tahapan ini mempunyai sisa yang sama yaitu adanya proses evaluasi. Evaluasi disini umumnya dilakukan setiap bulan, karena setiap kelompok dimintakan laporan pengembalian pinjamannya itu diakhir bulan. Laporan ini juga nanti akan di verifikasi oleh masing-masing lembaga yang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri.

Lain halnya yang dijelaskan oleh ibu Endang, informan yang bertanggung jawab sebagai salah satu tim pengelola kegiatan SPKP:

“perencanaan kegiatan di simpan pinjam kelompok perempuan ini punya beberapa tahap, salah satunya itu wawancara. Nah,, dari wawancara ini kami bisa mengetahui informasi tentang peminjam, dimana mereka ini umumnya ibu-ibu. Awalnya kita melakukan verifikasi kelompok dari tiap desa yang mengusulkan, memverifikasi dilhat dari usaha-usaha yang mereka jalankan, karena itukan usaha kelompok sehingga ada beberapa jenis usaha per-orangan juga, namun yang bertanggungjawab disini adalah ketua kelompok, kemudian setelah diverifikasi kelompok tersebut, kami akan mengklarifikasi apakah layak atau tidak kelompok ini mendapatkan pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan, setelah diverifikasi apa sudah layak usahanya, kami segera akan menyalurkan pinjaman tersebut.

Penjelasan oleh informan kedua ini menegaskan bahwa proses kegiatan yang dilakukan oleh simpan pinjam kelompok perempuan khususnya di

Kecamatan Tomilito ini bahwa harus melalui proses ataupun verifikasi. Salah satu prosesnya yakni wawancara, yang dilakukan kepada mereka kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan dana pinjaman.

Adapun tambahan penjelasan yang didapatkan dari bapak Aswan selaku bendahara UPK dalam menjawab terkait perencanaan kegiatan UPK:

“rencana kegiatan di lakukan setiap tahun dengan mengadakan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang di hadiri oleh pemerintah kecamatan dan kepala-kepala desa yang ada di kecamatan Tomilito. Dalam rapat tersebut kami membahas tentang pendapatan dan tunggakan”.

Informasi yang dijelaskan bapak Aswan atau informan ketiga dalam hal perencanaan kegiatan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yakni proses kegiatannya itu dilakukan melalui rapat musyawarah dengan antar desa. Rapat ini akan berlangsung dengan dihadirinya aparat pemerintah setempat dan kepala-kepala desa, dimana nantinya rapat ini akan membahas terkait peningkatan pendapatan ataupun tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh konsumen yang bisa mempengaruhi pendapatan kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan ketiga informan dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Tomilito umumnya dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan ini yakni berguna untuk mereka tim pengelola mendapatkan informasi akurat mengenai data peminjam. Program SPKP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan kesesuaian antara hasil yang didapatkan dengan tujuan yang ditetapkan. Simpan pinjam kelompok ini juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nantinya agar supaya program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana pinjaman.

Ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) adalah sebagai berikut: Kemudahan adalah masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

- a) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPKP di salurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan penelolaan pinjaman.
- b) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan di dasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- c) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan penumbuhan efektifitas ekonomi perdesaan.
- d) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Selama masa program pengembangan Kecamatan (PPK), UPK telah difungsikan untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa dan melakukan

pengelolaan dana bergulir. Selama ini juga pihak UPK dalam hal mengelola kegiatan mampu menjalankan fungsi sebagai pengelola kegiatan. Secara spesifik hasil kerja pendampingan perkuatan bagi pengurus UPK ditunjukkan oleh kemampuan pengurus UPK meliputi administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, laporan perkembangan pinjaman dana bergulir, menyusun rencana keuangan, mengelola dan menyalurkan dana bahkan beberapa UPK telah mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPK juga tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak ada badan pendamping yang dalam hal ini membantu kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni kegiatan pinjaman bergulir pada SPKP perdesaan. Kegiatan yang dilakukan oleh UPK adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin adalah pemberian pinjaman bergulir yang khususnya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.

Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Pengendalian dapat menjadi pokok dari perencanaan yang efektif. Suatu perencanaan yang terlalu teknis atau terlalu logis dapat menimbulkan suatu kerusakan pada pengendalian, karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Umumnya perencanaan merupakan pemilihan dan penggabungan fakta,

menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative kepuasaan dalam sebuah organisasi ataupun usaha.

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan didesa, di kecamatan, dan dikabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD sosialisasi sampai dengan pelatihan. Perencanaan disebut dengan istilah menggaggas masa depan desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif , dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

2. Pelaksanaan Program SPKP

Pelaksanaan SPKP sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat perdesaan beserta program pendukungnya. SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) oleh PNPM merupakan program penanggulangan kemiskinan diperdesaan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan bapak Sofyan : bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dananya. Beliau mengatakan:

“proses pelaksanaan penyaluran itu anggota kelompok mengajukan permohonan pinjaman ke UPK, terus permohonan anggota itu dievaluasi oleh upk pinjaman sebelumnya atau anggota pinjaman yang baru setelah poses diUPK selesai serahkan lagi ke tim verifikasi lapangan, tim verifikasi serahkan lagi ke badan pengawas menunggu hasil validasi badan

pengawas setelah dari pada pengawas diserahkan lagi ke tim pendanaan ditetapkan melalui MAD (Musyawara Antar Desa) setelah dari tim pendanaan lalu ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) menunggu pengesahan dari BKAD setelah disetujui oleh BKAD diserahkan lagi ke upk untuk disalurkan”.

Pernyataan dari bapak Sofyan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari ibu Endang yang menyatakan bahwa:

“penyalurannya dimulai setelah proposal pengajuan ini diverifikasi oleh kami, selanjutnya akan diperlihatkan ke UPK, setelah itu UPK akan memverifikasi kembali proposal mereka dengan melihat nominal pinjaman yang mereka pinjam, disini juga perlu diketahui bahwa ada namanya jaminan yang diperlihatkan oleh peminjam, jadi ini juga salah syarat apakah dana yang mereka pinjam bisa dengan nominal yang besar, kemudian setelah semua proses diverifikasi oleh tim monitoring kami selanjutnya akan di bawa ke desa untuk disalurkan dananya”.

Dari penjelasan wawancara dengan kedua informan diatas diketahui bahwa proses penyaluran dana ini masih akan melalui beberapa tahapan. Ini dimaksud untuk lebih mengetahui apakah peminjam bisa disetujui atau tidak dalam hal menerima pinjaman dari SPKP. Hal ini dipertegas dengan jawaban dari bapak Sofyan dan Ibu Endang bahwa penyaluran dana ini perlu adanya pemeriksaan yang dilalui dari beberapa tahapan yakni mulai dari diverifikasi oleh tim UPK samapi dengan campur tangan aparat desa.

Hal lain didapatkan dari penjelasan Bapak Aswan yang bertanggungjawab sebagai bendahara UPK:

“pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pemenuhan administrasi oleh konsumen kemudian dilakukan verifikasi berkas konsumen, melakukan verifikasi lapangan apakah konsumen tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak, dan melakukan rapat akhir dari hasil verifikasi sekaligus menyalurkan dana simpan pinjam kepada konsumen”.

Penjelasan bapak Aswan terkait pelaksanaan kegiatan UPK bahwa terlebih dahulu dilakukan pemenuhan administrasi oleh konsumen. Pemenuhan ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang konsumen. Informasi ini berhubungan dengan administrasi ataupun berkas-berkas penting yang nantinya ini akan menjadi dokumen penting dalam hal tim verifikasi lapangan maupun lainnya untuk mengeluarkan dana pinjaman ini atau tidak.

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana di SPKP Kecamatan Tomilito perlu adanya beberapa tahanpan untuk bisa diketahui apakah pinjaman ini disetujui atau tidak. Ini sejalan dengan penjelasan terkait Ketentuan pencairan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program
- b) Pencairan di lakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
- c) Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional UPK 3% dengan bukti kuitansi yang ditanda tangani oleh ketua UPK sebagai pengelolah kegiatan.
- d) kelompok perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi permintaan dana.
- e) kelompok menyerahkan kuintansi atau tanda terima uang pemanfaatan kepada UPK.

Pelaksanaan penyaluran dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan

modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Dana bergulir Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund) begulir/berputar mengandung dua makna yaitu a) dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan melalui kegiatan yang bersifat produktif, b) pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau kelompok yang lain. Keputusan Pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD oleh MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh forum MAD.

Selanjutnya bapak Sofyan menambahkan penjelasan terkait bagaimana pengelolaan dana dalam program ini.

“pendapatan UPK itu, UPK cuma diberi hak 75% dari total pendanaan misalnya UPK dapat bunga 30juta sebelun maka UPK hanya dibolehkan menggunakan 75% dana dari 30juta yang boleh gunakan dari insentif UPK dan lembaga lain perjalanan dinas kemudian yang selebihnya itu di lebur untuk tambahan modal dari 25% sisa bunga di lebur untuk tambahan modal. Pengelolahan dalam kegiatan dana upk itu hanya diberi hak 75% dari total pendapatan perbulan kemudian klau dikamulasi pendapatan setahun misalnya selama 1tahun itu upk dapat bunga pinjaman 100juta maka 50juta untuk tambahan modal kemudian 50juta dipilah lagi 15% untuk bakti sosial kegiatan, 35% untuk pembiayaan lembaga selama 1tahun itu kalau ada surflus yang bisa dibagi”.

Penjelasan informan diatas terkait pengelolaan dana ini bahwa adanya pendapatan yang mereka peroleh akan dibagi berdasarkan aturan yg diberlakukan oleh lembaga mereka. Pengelolaan kegiatan dana dalam program SPKP dilakukan

pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut, diantaranya adalah: pelestarian kegiatan dana bergulir, kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM, pelestarian prinsip pengelolaan, pelestarian kelembagaan dan pengembangan kelompok.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, kebutuhan manusiapun semakin berkembang. Begitu pula kebutuhan akan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagianbesar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun lembaga formal. Namun masyarakat lebih memilih lembaga formal seperti pinjaman bergulir UPK karena proses peminjaman yang cukup mudah.

Ketentuan pendanaan atau pengelolaan mengacu pada AD/ART aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana ini minimal harus memuat dana perguliran yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan SPKP dan tidak diperbolehkan memberikan secara individu. Kelompok yang didanai meiputi kelomok simpan pinjam kelompok yang menggeluti usaha serta kelompok usaha bersama dengan berbagai pemanfaatannya. Kelompok ini harus mempunyai kategori kelompok berkembang dan kegiatan ini juga perlu diverifikasi jenis kelompoknya agar penyaluran dananya bisa disesuaikan.

Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota penerimaan dana SPKP ini, salah satunya diharuskan sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan

oleh pihak UPK Mandiri Perdesaan. Penyuluhan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar anggota penerima dana tersebut paham betul tentang proram dan tujuan akhir dari program pinjaman bergulir UPK tersebut. Sehingga target akhir dalam penyaluran dana bantuan ini menjadi tepat sasaran dan dapat terbedaya warga masyarakat yang meggunakannya.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasiannya dana bantuan langsung bagi masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan melalui proram SPKP. Besarnya pengeluaran dana ini disesuaikan dengan kapasitas fiscal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

3. Pengawasan Kegiatan SPKP

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya.

Wawancara peneliti dengan informan Bapak Sofyan: peneliti bertanya: bagaimana pengawasan program ini. Penuturannya:

“UPK itu tidak bekerja sendiri UPK itu dalam hal ini dibawa naungan BKAD sehingga dikelembagaan itu tidak hanya UPK ada juga badan pengawas yang mengawasi pelaksanaan program UPK badan pengawas itu berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan dilakukan oleh UPK setiap bulan dilaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh lembaga dan kepala desa diwilayah itu”.

Penjelasan informan bapak Sofyan terkait pengawasan yang dilakukan oleh program SPKP atau UPK bahwa adanya campur tangan dari pihak BKAD yang dalam hal ini membantu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh UPK. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang diberlakukan oleh lembaga untuk melihat dan memantau ataupun mengevaluasi dari kegiatan tersebut. Pernyataan ini dipertegas dengan penjelasan oleh Ibu Endang:

“UPK dalam hal ini selalu member ruang untuk BKAD dalam mengawas atau memantau kegiatan program lembaga kami, selalu mengadakan rapat untuk mengetahui perkembangan dari beberapa kegiatan yang sudah dijalankan didesa”.

Penjelasan lain dari bapak Aswan terkait pengawasan program dari SPKP bahwa:

“Dalam pengawasan pada program ini terdapat yang namanya badan pemeriksa unit pengelola kegiatan (BPUPK) mereka melakukan pengawasan/audit setiap tahun sekali”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan, pihak ataupun lembaga program SPKP ini masih membuka ruang untuk pihak BKAD dan BPUPK untuk membantu memantau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mereka jalankan. Ini juga tidak terlepas dari adanya rapat koordinasi yang mereka laksanakan setiap selesai program kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan perkembangan kegiatan program SPKP. Dalam pelaksanaan pengawasan ini dilakukan setiap setahun sekali.

Pengawasan dalam hal ini mengevaluasi kinerja dari lembaga kegiatan tersebut. Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai

dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol). Prinsip-prinsip pengawasan: (a) dapat mereflesikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi, (b) dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, (c) fleksibel, (d) dapat mereflesikan pola organisasi, (e) dapat dimengerti. Pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dan semestinya.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM yakni Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dimana dalam hal melakukan pengawasan ataupun evaluasi dan pemeriksaan langsung dengan seksama dan sudah sesuai rencana yang nantinya akan dilaporkan kepihak yang memerlukan laporan kegiatan tersebut. Laporan kegiatan ini juga untuk melaksanakan misi perluasan usaha simpan pinjam kelompok didesa satu dan desa-desa yang lain sehingga potensi-potensi local dapat dikembangkan melalui penyediaan modal pinjaman yang terjangkau.

Pengawas UPK mempunyai tugas dan tanggungjawab yang selalu harus dipegang, karena penilaian kinerja mereka dilihat dari dua sisi tersebut. Tugas pengawas ini meliputi: melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit terhadap UPK untuk mengukur kinerja operasional (kepatuhan) maupun kinerja keuangan berdasarkan indikator yang berlaku dan mengarahkan UPK dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh lembaga.

4. Pelaporan Kegiatan SPKP

Laporan kegiatan merupakan sebuah laporan hasil dari suatu kegiatan, yang biasanya dibuat setelah kegiatan telah selesai. Melaporkan kegiatan biasanya membuat mereka menyebutkan kegiatan partisipasi (peserta). Dalam membuat sebuah laporan kegiatan tersebut yakni kepada penerima atau urutan hasil berikut sebagai bukti tanggung jawab manajer untuk kegiatan tersebut. Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu situasi atau kegiatan.

Sebagaimana wawancara peneltiti dengan informan bapak Sofyan: bagaimana pelaporan kegiatannya?

“jadi pelaporannya itu ada penggunaan laporan operasional dan ada laporan nikropainas atau laba rugi itu kalau setiap bulan ada dua bentuk laporan, laporan operasional dan laporan laba rugi laporan operasional mengurai tentang penggunaan dana oleh masing-masing lembaga dan berdasarkan hasil kegiatan masing- masing lembaga, lembaga itu dibiayai lewat kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan binaan kelompok, rapat bersama, evaluasi oleh badan pengawas, kegiatan seperti itu dalam laporan operasional, kemudian bicara soal kelancaran, tunggakan pendapat, dan laba rugi, keuntungan dan kerugian dalam upk laporan laba rugi kemudian ada laporan tahunan yang dia menghimpun semua laporan berjalan upk selama 1 tahun misalnya setiap bulan desember itu upk melakukan laporan tahunan bersama seluruh lembaga dan kecamatan”.

Hasil wawancara ini juga dipertegas oleh ibu Endang:

“untuk penanggungjawab pelaporan tentunya itu dilakukan oleh kelompok dimana yang bertanggungjawab itu adalah ketua kelompok. Jadi pelaporan yang kami terima itu langsung dari ketua kelompok kemudian diserahkan ke pihak UPK, laporan ini berbentuk laporan kegiatan dan juga laporan pembukuan yang berkaitan dengan dana saluran modal pinjaman kepada mereka, laporan ini bisa berupa laporan buku tahunan karena modal pinjaman ini berlaku selama 1 tahun”.

Melihat penjelasan kedua informan diatas terkait pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak SPKP bahwa pelaporan ini akan dilaporkan pada saat adanya evaluasi ataupun pemeriksaan. Laporan ini berbentuk dua laporan, berupa laporan kegiatan dan laporan laba rugi atau laporan pembukuan yang berhubungan dengan dana yang sudah disalurkan kepada pihak kelompok peminjam. Pihak kelompok peminjam juga perlu memiliki laporan yang harus disediakan dan akan dilaporkan pada saat pihak SPKP meminta, ini juga berpengaruh pada peningkatan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh lembaga program ini.

Adapun penjelasan yang diberikan bapak Aswan terkait hal tersebut:

“Pelaporan kegiatan di buat dalam bentuk laporan bulanan dan di periksa oleh BPUPK setiap tahun, sekaligus di laporkan kepada BKAD sebagai lembaga tertinggi, dan Melakukan rapat MAD tutup buku yang di hadiri oleh pemerintah kecamatan dan kepala- kepala desa yang ada di kecamatan tomilito”.

Penjelasan informan diatas terkait pelaporan bahwa dalam hal pelaporan kegiatan, harus memiliki laporan. Bentuk laporan ini ada yang dilakukan perbulan dan pertahun. Laporan ini nantinya akan di priksa oleh lembaga tertinggi untuk pemenuhan laporan konsumen dan untuk mengetahui peningkatan pendapatan ataupun tunggakan-tunggakan.

Pelaporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab kerja yang diperlihatkan oleh lembaga SPKP. Tanggungjawab penuh dalam pekerjaan membuat pekerjaan yang dilaksanakan menjadi lebih baik. Dari pelaporan ini juga bisa menimbulkan penilaian untuk mengvaluasi pekerjaan yang selanjutnya. Penilaian ini juga bermanfaat untuk lembaga yang berkepentingan karena dengan

adanya penilaian kita akan lebih tahu kekurangan dari kegiatan yang sudah kita jalankan.

Pelaporan kegiatan ini salah satunya dalam bentuk laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu usaha atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat atau merekam semua kegiatan atau transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan, sampai penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Dalam penjelasan PTO PNPM MPd (2012), jenis-jenis laporan keuangan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ada tiga, yaitu:

- a. Laporan arus dana, yaitu laporan yang menggambarkan tentang sumber, pengguna, dan perubahan dana dalam satu periode tertentu.
- b. Neraca/neraca microfinance, yaitu laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal tertentu (akhir bulan atau akhir tahun)
- c. Laporan operasional keuangan UPK/Laba Rugi UPK, yaitu laporan yang menggambarkan pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima, dan lain-lain serta biaya operasional UPK yang terjadi selama satu periode.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Tomilito umumnya dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan ini yakni berguna untuk mereka tim pengelola mendapatkan informasi akurat mengenai data peminjam.
2. Pelaksanaan penyaluran dana di SPKP Kecamatan Tomilito adanya pendapatan yang mereka peroleh akan dibagi berdasarkan aturan yg diberlakukan oleh lembaga mereka.
3. Pengawasan program SPKP ini masih membuka ruang untuk pihak BKAD dan BPUPK untuk membantu memantau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mereka jalankan. Ini juga tidak terlepas dari adanya rapat koordinasi yang mereka laksanakan setiap selesai program kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan perkembangan kegiatan program SPKP.
4. Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak SPKP yakni laporan kegiatan dan laporan laba rugi atau laporan pembukuan yang berhubungan dengan dana yang sudah disalurkan kepada pihak kelompok peminjam.

1.2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada pihak UPK dalam hal ini yang mengelola SPKP agar senantiasa mempertahankan peningkatan dalam penyaluran bantuan dana bagi mereka yang ingin melakukan suatu usaha dengan modal pinjaman.
2. Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih mendalam tentang pengarahan kegiatan UPK PNPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita 2011, *penengelolaan pendapatan dan anggaran daerah, Graha ilmu Yogyakarta*
- Aditsasmita, Raharjo. 2011. Manajemen pemerintahan daerah, Yogyakarta: penerbit Graha Ilmu.
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya. *Adsministrasi perkatoran modern*.Yogyakarta Liberty.
- Rue Dan Byars 2006 *Human Resource*. Perilaku Organisasi: Cetakan empat.
- Purwanto 2009 *Evaluasi hasil belajar*. Yogyakarta: pustaka belajar Rohani PengelolaanPelajaran.
- Pratama, Aditya Bagus. 2012. Kamus lengkap bahasa Indonesia, pustaka media press, Surabaya.
- Sutarno 2004, *Manajemen Perpustakaan dan Informasi*. Jakarta: Jala.
- Sujarto dalam Adisasmita 2011 Pembangunan Pedesaan dan perkotaan Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subagyo 2000 *Jurnal Efektifitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Kutai selaatan kabupaten Bandung*. Universitas Udayana Fakultasd Ekonomi dan Bisnis. Maria Viane Chinggih Widanarto.
- Sugiono 2009, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno NS 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Samitra Media Utama.

Wira Saputra 2009, *Jurnal Economix Analisis pengelolaan anggaran*. Analisis Pengelolaan anggaran rutin.

Yolanda Hangkihu 2014 :*Pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan*. Di desa bendungan kecamatan bone bolango

PEDOMAN WAWANCARA

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses penyusunan Rencana Kegiatan program simpan pinjam kelompok perempuan di kecamatan tomilito ?	Rencana kegiatan di lakukan setiap tahun dengan mengadakan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang di hadiri oleh pemerintah kecamatan & kepala – kepala desa yang ada di kecamatan tomilito. Dalam rapat tersebut kami membahas tentang pendapatan dan tunggakan.
2	Bagaimana proses penyaluran program SPKP ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan administrasi oleh konsumen • Dilakukan verifikasi berkas konsumen • Melakukan verifikasi lapangan apakah konsumen tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak • Melakukan rapat akhir dari hasil verifikasi sekaligus menyalurakan dana simpan pinjam kepada konsumen
3	Bagaimana pengelolaan dana dalam program ini ?	Dalam pengelolaan dana setiap bulannya sekertaris upk membuatkan laporan bulanan yaitu laporan pengeluaran dan laporan pemasukan,
4	Bagaimana pihak pengelola kegiatan ini dalam penggunaan dana ?	dalam penggunaan dana di upk sudah cukup baik, karena setiap penggunaan dana selalu ada pelaporan agar dana yang masuk dan keluar bisa di pertangungjawabkan

5	Bagaimana Pengawasan kegiatan program ini ?	Dalam pengawasan pada program ini terdapat yang namanya badan pemeriksa unit pengelola kegiatan (BPUPK) mereka melakukan pengawasan/audit setiap tahun sekali
6	Bagaimana pelaporan pengelolaan kegiatannya ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kegiatan di buat dalam bentuk laporan bulanan dan di periksa oleh BPUPK setiap tahun, sekaligus di laporkan kepada BKAD sebagai lembaga tertinggi • Melakukan rapat MAD tutup buku yang di hadiri oleh pemerintah kecamatan dan kepala- kepala desa yang ada di kecamatan tomilito.

1.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975, Fax: (0435) 829975
E-mail: lembaga.penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2256/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTOII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KETUA UPK DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO

di,-

Kab. Gorontalo Utara

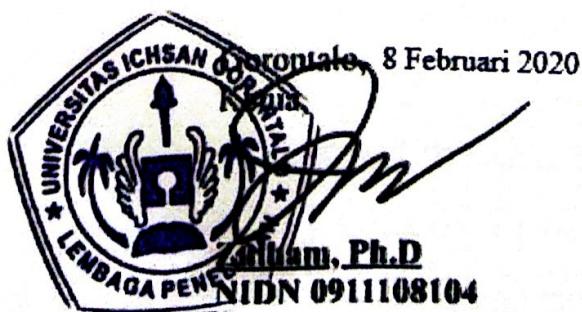
Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :

**Nama Mahasiswa : Finko Djafar
NIM : E1116131
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : UNIT PELAKSANA KEGIATAN (UPK) DI DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO
Judul Penelitian : PENGELOLAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN
BADAN KERJA SAMA ANTARA
KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jl. Trans Sulawesi, tomilito, kabupaten gorontalo utara

Nomor :001/BKAD-TOMILITO/III/2020
Sifat : Penting
Lamp :-
Perihal : Surat Izin Penelitian

Tomilito, 12 Mei 2020
Kepada Yth,
Dekan Universitas Ichsan gorontalo
Di
Tempat

Dengan Hormat

Dengan menindak lanjut izin melakukan penelitian, bertanggal 28 februari 2020, Saya Ketua Unit Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada PNPM kecamatan tomilito, kabupaten Gorontalo Utara. Mengizinkan Kepada

Nama : Finko Djafar
Nim : E.11.16.131
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Univ. : Universitas Ichsan Gorontalo
Judul penelitian : Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada PNPM di desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten gorontalo Utara

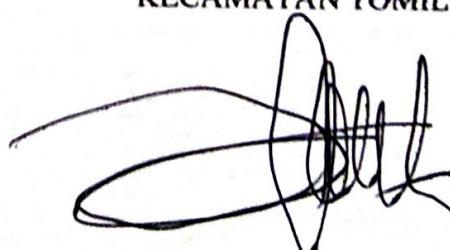
Untuk melakukan Penelitian Yang di Maksud untuk pengambilan data /sampel Ke kelompok pemanfaatkan simpan pinjam perempuan (SPKP).

Demikian surat izin disampaikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 12 Mei 2020

KETUA UNIT PENGELOLAAN SPKP

KECAMATAN TOMILITO



Sofyan Yusuf S.Pdi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0369/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FINKO DJAFAR
NIM : E1116131
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : pengelolaan simpan pinjam kelompok perempuan di desa bubode kecamatan tomilito kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama
Sebagai | : | Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si
Pembimbing I |
| 2. Nama
Sebagai | : | Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
Pembimbing II |

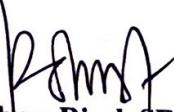
Dengan ini Menyatakan bahwa :

- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Mahasiswa | : | FINKO DJAFAR |
| NIM | : | E1116131 |
| Program Studi | : | Akuntansi (S1) |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Judul Skripsi | : | pengelolaan simpan pinjam kelompok perempuan di desa bubode kecamatan tomilito kabupaten Gorontalo Utara |

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 31% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.

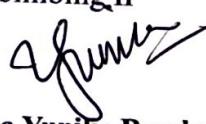
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I

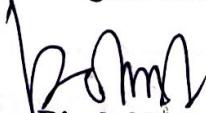

Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si
NIDN. 0914027902

Gorontalo, Juli 2020

Pembimbing II


Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Rahma Rizal, SE., M.Ak

Skripsi_FINKO DJAFAR_E 11 16 131_PENGELOLAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA BUBODE KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA

ORIGINALITY REPORT

31 %	31 %	8 %	23 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anzdoc.com Internet Source	4 %
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3 %
3	id.123dok.com Internet Source	2 %
4	media.neliti.com Internet Source	2 %
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2 %
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2 %
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %

9	vdocuments.site Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	bppkbkajen.blogspot.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
15	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1 %
16	pt.scribd.com Internet Source	1 %
17	www.pdfio.com Internet Source	1 %
18	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %

20	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
21	a-research.upi.edu Internet Source	1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
24	takihumasunj.com Internet Source	<1 %
25	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
27	distribusi.unram.ac.id Internet Source	<1 %
28	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.p2kp.org Internet Source	<1 %
31	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

32	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
33	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
34	id.scribd.com Internet Source	<1 %
35	pnpmmptonra.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words